

TESIS

**EFEKTIVITAS KOLABORASI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI KABUPATEN BONE**

Oleh:

**ANISA FITRI
E012212008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023**

TESIS

**EFEKTIVITAS KOLABORASI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI KABUPATEN BONE**

Oleh:

**ANISA FITRI
E012212008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**EFEKTIVITAS KOLABORASI DALAM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BONE**

Disusun dan diajukan oleh

ANISA FITRI

E012212008

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **21 Agustus 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,

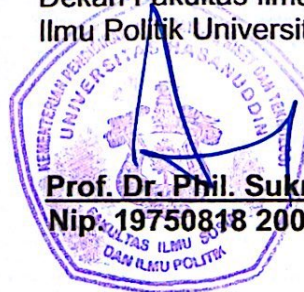

Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si.
Nip. 195705077 198403 1 001

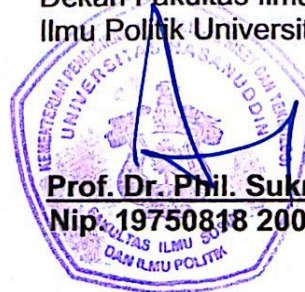

Dr. Suryadi Lambali, MA.
Nip. 19590118 198503 1 006

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Dr. Gita Susanti, M.Si
Nip. 19650311 199103 2 001


Prof. Dr. Phil. Sukri, S.I.P., M.Si.
Nip. 19750818 200801 1 008



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisa Fitri
NIM : E012212008
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul, ***Efektivitas Kolaborasi dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bone***

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alih tulisan orang lain, bahwa Tesis yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar 21 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Anisa Fitri

ABSTRAK

ANISA FITRI. *Efektivitas Kolaborasi dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bone* (dibimbing oleh Mohamad Thahir Haning dan Suryadi Lambali).

Penelitian ini bermaksud menjelaskan dan menganalisis efektivitas kolaborasi dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bone dengan melihat dari lima indikator, yaitu tujuan umum, mutualitas, lingkungan kolaborasi, kepercayaan, dan karakteristik peserta kolaborasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tujuan umum dalam kolaborasi percepatan *stunting* menunjukkan keberhasilan, (2) mutualitas telah berhasil dilakukan, *stakeholders* saling bertukar sumber daya, (3) lingkungan kolaborasi dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bone dalam hal kepemimpinan diterima oleh peserta kolaborasi, (4) kepercayaan antarpeserta kolaborasi masih perlu ditingkatkan, dan (5) karakteristik peserta kolaborasi dalam hal keterbukaan antar*stakeholders* masih perlu ditingkatkan.

Kata kunci: efektivitas, kolaborasi, *stunting*



ABSTRACT

ANISA FITRI. *The Effectiveness of Collaboration in Accelerating the Reduction of Stunting in Bone Regency* (supervised by Mohamad Thahir Haning and Suryadi Lambali)

This study aims to explain and analyze the effectiveness of collaboration in accelerating the reduction of stunting in Bone Regency by looking at five indications, namely common goals, mutuality, collaborative environment, trust, and the characteristics of the collaboration participants. The method used was descriptive qualitative method with data collection techniques including observation, interview, and documentation. Data analysis techniques consisted of data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of the study show that (1) the general goals in collaboration to accelerate stunting show success; (2) mutuality has been successfully carried out in which stakeholders exchange resources with each other; (3) an environment of collaboration in accelerating the reduction of stunting in Bone Regency, in this case, leadership is accepted by the collaboration participants; (4) trust between collaboration participants still needs to be increased, and (5) the characteristics of collaboration participants, in this case the openness between stakeholders still needs to be improved.

Keywords: effectiveness, collaboration, stunting



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji hanya kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-nya yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan ilmu sehingga insya-Allah diridhoi dan penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita senantiasa menjadi pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat dalam rangka penyelesaian pendidikan Magister (S2) pada program studi Magister Administrasi Publik Universitas Hasanuddin. Tesis ini terdiri dari enam bab yaitu BAB I pendahuluan, BAB II tinjauan pustaka, BAB III metode penelitian, BAB IV gambaran lokasi penelitian, BAB V hasil penelitian dan pembahasan, dan BAB VI penutup. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini banyak melibatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Phil Sukri, S.I.P, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta staf, atas segala

bentuk pelayanan serta memberikan fasilitas di dalam perkuliahan dan persetujuan mengadakan penelitian sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Ibu Dr. Gita Susanti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kelancaran pelayanan dalam urusan akademik.
4. Bapak Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si, selaku pembimbing pertama saya yang dengan kesabaran dan keikhlasan membimbing, mengarahkan, serta memberi motivasi kepada penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Suryadi Lambali, MA, pembimbing kedua penulis yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan, tenaga dan pikiran, arahan yang tak pernah berhenti serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Muh Akmal Ibrahim, M.Si selaku penguji pertama saya yang telah banyak memberikan masukan berupa kritik dan saran yang membangun.
7. Bapak Dr. H. Muhammad Yunus, MA selaku penguji kedua saya yang telah memberikan masukan berupa saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini
8. Ibu Dr. Syahribulan, M.Si selaku penguji ketiga saya yang telah ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan saran

dalam proses penyusunan tesis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

9. Bapak/Ibu dosen Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin yang dengan sabar membimbing dan mendidik penulis selama berada dibangku perkuliahan hingga penulis menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin.
10. Bapak dan Ibu pegawai beserta staf akademik yang telah memberikan kemudahan dalam mengurus administrasi dalam lingkup fakultas.
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Dinas Ketahanan Pangan Bone, Dinas Sosial Kabupaten Bone selaku informan yang telah memberikan kemudahan memperoleh data dan informasi terkait tesis ini
12. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
13. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Hasanuddin Angkatan 2022 yang senantiasa membantu selama ini dalam perkuliahan dan memberikan motivasi.

Terutama Ilmi, Shinta, Irna, dan Novi. Semoga proses yang kita lewati bersama dapat memberikan hasil yang kita inginkan.

14. Teman-teman *benchmarking* Singapura, Malaysia, Thailand tahun 2022, serta Andi Nur Alam rezeki, S.A.P, M.A.P yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis.

15. Kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya, namun telah membantu dalam penyelesaian studi.

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada bapak dan ibu tercinta Jusman dan Nuraini atas segala doa, perhatian, pengertian dan kasih sayangnya yang begitu mendalam dan melimpah yang tak henti-hentinya memperhatikan, memberikan dukungan moral dan materil serta membimbing penulis menjadi seseorang yang lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Serta ketiga saudaraku Nurul Asmira, Sultan Azlan Syah, Nur Azizah Khumairah yang senantiasa memberikan semangat, dorongan dan doa kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang untuk kalian. Semoga segala bantuan, dukungan, bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang telah diberikan mendapat ridho dan dibalas dengan amal ibadah dari Allah SWT. Semoga tesis ini bermanfaat kepada setiap pembaca. Aamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 28 Mei 2023

Anisa Fitri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kolaborasi Dalam Perspektif Administrasi Publik	10
B. Konsep <i>Collaborative Governance</i>	16
1. <i>Collaborative Governance</i>	16
2. Komponen-Komponen <i>Collaborative Governance</i>	20
3. Model-Model dan Proses <i>Collaborative Governance</i>	29
C. Definisi Efektivitas	38
D. Konsep Stunting	39
1. Definisi Stunting	39
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stunting	41
3. Dampak Stunting	49
4. Ciri – Ciri Anak yang Mengalami Stunting	50
5. Dasar Hukum dan Komitmen Nasional Percepatan Pencegahan Stunting.....	51
E. Penelitian Terdahulu	53
F. Kerangka Pikir.....	65
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	67
B. Lokasi Penelitian	67
C. Fokus Penelitian	67

D. Deskripsi Fokus Penelitian	68
E. Tahap Penelitian	70
F. Sumber Data.....	70
G. Instrumen Penelitian	72
H. Prosedur Pengumpulan Data	72
I. Pengecekan Keabsahan Data Penelitian	73
J. Teknik Analisis Data.....	74
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	77
A. Gambaran Umum Kabupaten Bone	77
B. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bone	81
C. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone.....	88
D. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone	95
E. Gambaran umum Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone	98
F. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Bone.....	104
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	115
A. Hasil Penelitian	115
1. Tujuan umum dalam Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bone	115
2. Mutualitas dalam Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bone	122
3. Lingkungan yang Memungkinkan dalam Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bone	130
4. Kepercayaan antara Stakeholders dalam Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bone	134
5. Karakteristik Pribadi Tertentu dalam Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bone	138
B. Pembahasan.....	146
1. Tujuan Umum dalam Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bone	146
2. Mutualitas dalam Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bone	150
3. Lingkungan yang Memungkinkan dalam Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bone	152
4. Kepercayaan antara Stakeholders dalam Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bone	155

5. Karakteristik Pribadi Tertentu dalam Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bone	158
BAB VI PENUTUP	169
A. Kesimpulan	169
B. Saran.....	170
DAFTAR PUSTAKA	172
LAMPIRAN.....	181

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Angka stunting di Kabupaten Bone tahun 2018-2020	4
Tabel 2 Penelitian terdahulu.....	54
Tabel 3 Sumber daya yang telah dikontribusikan	124
Tabel 4 Daftar penerima P2L Kabupaten Bone 2022	125
Tabel 5 Balita stunting 3 tahun terakhir Kabupaten Bone	129
Tabel 6 Hasil analisis indikator efektivitas kolaborasi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone	161
Tabel 7 Penurunan angka stunting di Kabupaten Bone 2020-2022.....	164
Tabel 8 Rekapitulasi lima indikator efektivitas kolaborasi percepatan penurunan stunting.	165
Tabel 9 Peran dan program masing-masing OPD	166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Collaborative Governance Ansell dan Gash.....	29
Gambar 2 Kerangka kerja integrative untuk Collaborative Governance ..	36
Gambar 3 Tiga Tahap Proses Collaborative Governance dan Action Planning.....	36
Gambar 4 Kerangka Pikir	66
Gambar 5 Letak Geografis Kabupaten Bone	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stunting atau yang biasa disebut dengan balita kerdil merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini terutama pada Negara miskin dan Negara berkembang. Masalah stunting memiliki dampak yang cukup serius, antara lain menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, tidak optimalnya ukuran fisik tubuh, menurunnya kapasitas intelektual, gangguan struktur dan fungsi saraf serta sel-sel otak yang bersifat permanen sehingga menyebabkan turunnya produktivitas. Pada masa yang akan datang, kondisi stunting akan menjadi beban ekonomi bagi suatu negara. Dengan dampak luar biasa yang akan dihadapi suatu bangsa, maka stunting menjadi permasalahan yang harus segera diintervensi oleh pemerintah.

Berdasarkan data dari *World Health Organization (WHO)* Pada tahun 2017, 22,2% atau sekitar 150,8 juta anak balita di dunia mengalami stunting. Masih menurut data yang sama, *World Health Organization (WHO)* mengungkapkan pada tahun 2019 penurunan stunting hanya 0,9% saja yaitu menjadi 21,3% atau sekitar 144 juta balita masih mengalami stunting.

Global Nutrition Report 2016 mencatat bahwa prevalensi stunting yang ada di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Tercatat pula bahwa di kawasan Asia Tenggara, stunting di Indonesia merupakan tertinggi kedua setelah Kamboja. Sementara itu, anak merupakan aset

bangsa di masa depan. Bisa dibayangkan, bagaimana nasib sumber daya manusia Indonesia di masa depan jika saat ini banyak anak Indonesia yang menderita stunting. Negara ini tidak akan mampu bersaing dengan negara lain dalam menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut permasalahan stunting harus segera diatasi secara serius.

Di Indonesia, stunting merupakan masalah serius dan juga merupakan masalah gizi utama yang sedang dihadapi. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar, prevalensi stunting di Indonesia dari tahun ke tahun berturut turut dari tahun 2007, 2010, 2013 dan 2018 adalah 36,8%; 34,6%; 37,2%; dan 30,8% (Kemenkes RI, 2018). Tingginya prevalensi kejadian stunting pada balita di Indonesia memerlukan upaya dalam menanggulangi dan mencegah stunting sejak dini. Pemerintah dalam menyusun kegiatan RPJMN 2020-2024 terkait program kesehatan masyarakat memfokuskan program prioritas seperti penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penurunan prevalensi stunting dan wasting pada balita yang kemudian diikuti dengan indikator-indikator pendukung (Kemenkes RI, 2020). Hal ini selaras dengan salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang termasuk pada tujuan kedua yaitu untuk mengakhiri kelaparan dan segala bentuk malnutrisi serta mencapai ketahanan pangan pada tahun 2030.

Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi, seperti tidak terpenuhinya gizi yang dibutuhkan dan terkena penyakit infeksi berulang dalam jangka waktu lama (kronis). Selain itu, faktor kehamilan ibu seperti

usia pada saat hamil, tinggi badan ibu, indeks massa tubuh, kenaikan berat badan selama hamil, tersedianya diet energi protein yang seimbang, merupakan faktor utama yang berhubungan dengan berat badan lahir, panjang badan lahir, dan stunting postnatal (Prendergast, 2014).

Dalam rangka penanganan stunting, pemerintah Indonesia mengutamakan pencegahan, pendekatan multisektor, dan sistem data yang terintegrasi. Pada tahun 2018, ditetapkan 100 kabupaten di 34 provinsi sebagai lokasi penurunan stunting. Pencegahan dan penurunan stunting melibatkan kerja sama dengan berbagai lintas sektor mengingat bahwa stunting merupakan masalah yang sangat kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dengan adanya kerja sama lintas sektor ini diharapkan dapat menekan angka stunting di Indonesia sehingga dapat tercapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2025 yaitu penurunan angka stunting hingga 40%.

Penanggulangan stunting sendiri mengenal istilah intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik adalah bentuk program yang bersifat jangka pendek dan lebih fokus pada layanan kesehatan. Intervensi gizi spesifik dilakukan dengan dua metode yakni pada saat kehamilan dan pasca kehamilan. Sedangkan intervensi sensitif adalah upaya melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayah yang menjadi fokus stunting dan lebih bersifat jangka panjang.

Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang memiliki prevalensi stunting yang hampir sama dengan angka nasional yaitu sebesar

30,1% dan berada di urutan ketiga belas dengan prevalensi kejadian stunting pada balita tertinggi di Indonesia. Sebanyak 13 kabupaten/kota dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki prevalensi stunting di atas angka provinsi. Berdasarkan kondisi ini, Bappenas menetapkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah konvergensi stunting dengan 11 kabupaten yaitu Enrekang, Bone, Gowa, Takalar, Jeneponto, Sinjai, Selayar, Pangkep, Pinrang, Tana Toraja, dan Toraja Utara sebagai lokus penanganan dan pencegahan stunting (Menteri PPN/Bappenas, 2020).

Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan dengan angka stunting yang tergolong tinggi. Kabupaten Bone menempati urutan ke-4 sebagai kabupaten dengan prevalensi stunting yang tinggi dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan setelah Jeneponto, Maros, Takalar. Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang menjadi lokasi intervensi penanganan stunting sejak tahun 2019 mengingat angka stunting di Kabupaten Bone yang terbilang cukup tinggi. Adapun angka stunting di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Angka stunting di Kabupaten Bone tahun 2018-2020

Tahun	Angka
2018	40,1
2019	37,0
2020	33,0

Sumber: laman resmi Bone; Bone.go.id tahun 2021

Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan prevalensi stunting sebesar 40,1% pada tahun 2018, tahun

2019 37,0%, dan tahun 2020 setinggi 33,0% (laman resmi bone: bone.go.id). Berdasarkan data tersebut, di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa terjadi penurunan stunting dalam 3 tahun terakhir, akan tetapi angka ini masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan ambang batas yang ditetapkan WHO yaitu 20% dan penurunan angka tersebut masih jauh dari yang ditargetkan.

Berdasarkan tingginya angka stunting di Kabupaten Bone, stunting menjadi salah satu prioritas permasalahan di Kabupaten Bone sesuai dengan tuntutan visi misi Bupati Bone 2018-2023, yaitu program peningkatan pemerataan dan kualitas derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bone, dan sebagai langkah selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bone mengeluarkan Peraturan Bupati No 3 tahun 2020 tentang konvergensi pencegahan dan penurunan stunting. Selanjutnya, Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 188 tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Bone yang diharapkan memberikan kontribusi dalam menekan angka Stunting.

Kompleksnya permasalahan stunting dan tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Bone tentu saja membutuhkan kerjasama dengan lintas sektor. Kerjasama dalam lintas sektor ini dalam bidang administrasi publik disebut dengan *collaborative governance*. *Collaborative governance* adalah jenis “*governance* yang mendorong upaya bersama dari pemangku kepentingan dan non-state untuk saling bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan kolektif

dan implementasi. Sehingga konsep *collaborative governance* mengacu pada sekelompok stakeholders yang saling ketergantungan. Dalam pencegahan dan penanggulangan stunting, kebijakan yang dibuat di tingkat pusat, harus konvergensi hingga tingkat desa. Aksi tersebut tidak hanya melibatkan sektor kesehatan tetapi juga sektor terkait lainnya. Pendekatan kolaborasi ini diyakini sebagai jembatan untuk menurunkan stunting dan mencegah terjadinya stunting.

Kolaborasi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone telah dilakukan sejak tahun 2019, dan telah menurunkan angka stunting. Akan tetapi penurunan tersebut masih jauh dari yang diharapkan, sehingga Kabupaten Bone masih memiliki angka stunting yang tergolong tinggi di Sulawesi Selatan. Adapun beberapa masalah dalam kolaborasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone, antara lain masih lemahnya komunikasi antara stakeholders yang terlibat, masih rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta. Hal ini berarti masih kurangnya kepercayaan (*trust*). Kurangnya kepercayaan ini akan menyebabkan rendahnya mutualitas atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan sehingga tujuan yang diharapkan akan membutuhkan waktu yang lama untuk dicapai. Dalam Keputusan Bupati Bone Nomor 188 tahun 2022 telah disebutkan bahwa salah satu tugas tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone yaitu menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, akan tetapi para pemangku kepentingan masih kurang dalam menjalankan kemitraan, para pemangku

kepentingan masih cenderung berjalan dengan sendiri-sendiri. Hal ini berarti para pemangku kepentingan memiliki karakteristik tersendiri sehingga mempengaruhi kolaborasi yang diharapkan.

Kolaborasi dengan lintas sektor tentu saja membutuhkan tujuan yang jelas, kepercayaan (*trust*), hal ini sangat penting karena apabila tidak ada kepercayaan antara para stakeholders maka lembaga atau organisasi yang seharusnya bekerja sama, akan berjalan dengan sendiri-sendirinya tanpa adanya komitmen bersama sehingga tujuan bersama yang diharapkan akan sulit untuk dicapai. Dan, apabila kolaborasi ingin efektif maka haruslah ada timbal balik yang terjadi antara sesama stakeholders (mutualitas), kolaborasi yang terjadi juga harus saling menguntungkan, sehingga kemungkinan munculnya konflik akan rendah.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Efektivitas Kolaborasi dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bone”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas kolaborasi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone. Selanjutnya masalah pokok tersebut akan dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tujuan umum dalam kolaborasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone?

2. Bagaimana mutualitas dalam kolaborasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone?
3. Bagaimana lingkungan yang memungkinkan dalam kolaborasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone?
4. Bagaimana kepercayaan antara stakeholders dalam kolaborasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone?
5. Bagaimana karakteristik pribadi tertentu dalam kolaborasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tujuan umum dalam kolaborasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone
2. Mendeskripsikan dan menganalisis mutualitas dalam kolaborasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone
3. Mendeskripsikan dan menganalisis lingkungan yang memungkinkan dalam kolaborasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone
4. Mendeskripsikan dan menganalisis kepercayaan antara stakeholders dalam kolaborasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone
5. Mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik pribadi tertentu dalam kolaborasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Secara teoritis, penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu sosial secara umum dan administrasi public secara khusus mengenai *collaborative governance* dalam percepatan penurunan stunting
2. Secara akademik, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mendalami dan melakukan penelitian serupa ditempat lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Kolaborasi Dalam Perspektif Administrasi Publik

Secara Kelembagaan, *governance* meliputi tiga ranah, yaitu *state* (Negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat dimana ketiganya saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. *State* berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *private sector* berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan, *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik (LAN-BPKB, 2000).

(Kooiman, 1993) menguraikan dengan lebih rinci definisi dari *governance* sebagai serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan publik dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *governance* adalah sebuah proses, bukan struktur.

Pengertian *governance* telah mengalami perubahan dalam beberapa tahap yaitu: pertama, semakin meluasnya definisi publik. Definisi publik bukan hanya pemerintah, tetapi juga memasukkan berbagai institusi dan organisasi di luar pemerintah (Fredericson G. H., 2002). Kedua, sebagai reaksi akan kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah ini

menimbulkan tekanan penggantian pejabat publik oleh kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisir dalam bentuk deregulasi. Ketiga, konsep *governance* muncul dari literatur ekonomi kelembagaan. Williamson memandang seluruh mekanisme koordinasi sebagai bentuk *governance* seperti pasar, *hierarchy*, *networks*, dan norma informal. Semuanya dianggap sebagai mekanisme *governance* (Agranoff, 2003).

Pengertian *governance* selalu mengalami perubahan dan perluasan makna, seperti yang akan dijelaskan berikut ini. *Governance* memiliki perhatian terhadap pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, hal ini disebabkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya sudah semakin kompleks akan tantangan dan masalah yang dihadapi (Dwiyanto A. , 2018); (Retno Sunu Astuti, 2020, p. 32).

Dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik diperlukan proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran dan saling kontrol antar tiga komponen: pemerintah (*government*), rakyat (*citizen/civil society*) dan usahawan (*business*) di sektor swasta (Supriadi, 2015).

Governance banyak dipergunakan sebagai padanan untuk menggantikan istilah “administrasi publik” atau setidaknya tidaknya merujuk pada padanannya cukup banyak (Rosenbloom, 2014); (Peters, 1995); (Salamon, 1989); (Retno Sunu Astuti, 2020, p. 32).

(Stoker, 2018) mengemukakan *governance* disusun dalam lima proposisi yaitu: pertama, *governance* mengacu pada seperangkat lembaga dan aktor yang diambil dari tetapi juga di luar pemerintah. Kedua, *governance* mengidentifikasi kaburnya batasan dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Ketiga, *governance* mengidentifikasi ketergantungan kekuasaan yang terlibat dalam hubungan antar institusi yang terlibat dalam aksi kolektif. Keempat, *governance* adalah tentang jaringan aktor yang mengatur dirinya sendiri secara otonom. Kelima, *governance* mengakui kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bertumpu pada kekuasaan pemerintah untuk memerintah atau menggunakan wewenangnya. Ia melihat pemerintah mampu menggunakan alat dan teknik baru untuk mengarahkan dan membimbing.

Menurut Roderick Arthur William Rhodes, mengatakan bahwa *governance* merujuk pada perubahan dari tata kelola pemerintahan yang bermakna lebih luas meliputi sebuah proses baru pengaturan (*new process of governing*), perubahan kondisi kaidah pengaturan (*a changed condition ordered rule*), atau sebuah metode baru dimana masyarakat diatur (*new method by which society is governed*) (Rhodes, 1996). Dalam konsep *governance*, pemerintah atau *government* merupakan salah satu aktor dan bukan menjadi aktor tunggal dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan.

Menurut Cheema dalam (Keban, 2008, p. 38), *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-

urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Oleh karena itu, institusi dari *governance* meliputi tiga domain yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Sedarmayanti, 2012).

Istilah "*governance*" digunakan untuk menggambarkan proses mendasar dari pemerintahan modern yang berbeda dengan pemerintahan tradisional. Proses politik dipandang lebih luas dimana warga negara maupun kelompok masyarakat ikut dalam pembuatan kebijakan publik yang penting (Ikeanyibe, 2016). *Governance* memerlukan sektor lain (menguntungkan secara keuangan dan atau tidak) untuk menyediakan layanan, sementara pemerintah hanya mengatur dan mengarahkan. Secara keseluruhan, "*governance*" mensyaratkan penyerahan pelayanan (desentralisasi/ pembagian kekuasaan dan fungsi) pada jaringan organisasi nirlaba, perusahaan swasta maupun kepada tingkat pemerintahan lainnya (Ewalt, 2001). Pada dasarnya, "*governance*" melibatkan kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kemitraan ini termasuk melibatkan penduduk lokal, organisasi masyarakat, sektor publik maupun swasta (Gibson, 2011).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam konsep *governance*, beberapa urusan-urusan publik yang sebelumnya dikelola oleh aktor tunggal yakni pemerintah menjadi dikelola bersama

dengan aktor-aktor lain seperti sektor swasta dan masyarakat. dengan adanya *governance* menjadikan pemerintah tidak lagi dominan dan menciptakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan urusan-urusan publik.

Frederickson menegaskan istilah administrasi publik seringkali digunakan untuk menjelaskan administrasi pemerintahan, sehingga kajiannya hanya membahas masalah politik, anggaran, kepegawaian, dan penyediaan pelayanan. Namun, publik mencakup masalah yang luas dan bukan hanya sekedar organisasi pemerintah tetapi ke organisasi di luar pemerintah seperti nirlaba, bisnis dan semuanya saling berinteraksi satu dengan lainnya (Fredericson G. H., 1997).

Perluasan istilah ini membawa konsekuensi bahwa pengertian administrasi publik tidak hanya mencakup organisasi publik tetapi meluas kepada organisasi non publik. (Brinkerhorff, 2002) menyatakan bahwa hubungan antara pemerintah, pasar dan organisasi nirlaba selama ini dipandang sebelah mata. Namun hubungan kerja sama antara ketiganya merupakan jalan keluar ketika salah satu diantaranya tidak mampu mengatasi masalah secara independen. Bentuk relasi tersebut antara dua kemungkinan, yaitu hubungan bersifat represif, rivalitas, dan bersaing (pada pemerintahan yang bersifat resisten dan monolitik) dan hubungan yang bersifat kooperatif, komplementer, dan kolaborasi (pada pemerintahan yang akomodatif terhadap perbedaan).

(Goddard, 2006) dengan mengutip yang dikemukakan Lyon mengatakan bahwa ada empat model relasi pemerintah dengan organisasi sektor ketiga khususnya dalam bidang pendanaan dan pelayanan sosial. 1) Model *philanthropist*, disini pemerintah memberikan dukungan terhadap suatu proyek setelah didekati oleh organisasi masyarakat; 2) model *submission*, pemerintah menyediakan dana secukupnya untuk suatu proyek dan organisasi ketiga menentukan lokasi pelayanan; 3) model *planning*, pemerintah menentukan secara penuh rencana dan lokasi proyek; 4) model penawaran bersaing (*competitive tendering model*), pemerintah menentukan perangkat aturan dan standar serta sekaligus memantau penyediaan pelayanan (yang dilakukan oleh organisasi sektor ketiga).

Kemudian (Goddard, 2006) memaparkan lima karakteristik kunci relasi kemitraan pemerintah dengan organisasi sektor ketiga. Pertama, *shared aims*, dimana tingkat kepentingan dua organisasi sama atau saling tergantung. Dalam hubungan ini sangat dibutuhkan saling percaya, sejajar, dan resiprositas. Kedua, *trust*, organisasi atau stakeholders yang terlibat harus saling mempercayai untuk bersama-sama mencapai tujuan. Ketiga, *resiprositas*, semua mitra mendapat manfaat dari relasi. Keempat, *equity*, pengaturan relasi menjamin terciptanya keadilan yang merata untuk menjamin bahwa semua mitra memiliki suara dan berbagi kekuasaan (*shared power*). Kelima, *shared funding*, adanya komitmen untuk berbagi

sejumlah hal seperti biaya administrasi, pekerja, sumber daya secara transparan.

Goddard menyimpulkan bahwa hubungan antara pemerintah dan organisasi sektor ketiga telah berubah dari birokrasi administrasi formal ke model yang bersifat kolaboratif. Kolaborasi merupakan salah satu bentuk konsep hubungan yang saling melengkapi, khususnya hubungan pemerintah dan lembaga nirlaba, dan organisasi sektor ketiga serta organisasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka kolaborasi merupakan bagian dari kajian administrasi publik.

B. Konsep *Collaborative Governance*

1. *Collaborative Governance*

Dalam beberapa dekade terakhir, bentuk pemerintahan baru telah muncul untuk menggantikan metode administrative dalam pembuatan dan implementasi kebijakan. *Collaborative governance* telah menjadi isu teoritis dan praktis yang muncul dalam administrasi publik karena semakin diadopsi di tingkat lokal. Konsep *Collaborative governance* biasanya mengacu pada “sekelompok pemangku kepentingan yang saling bergantung, biasanya dari berbagai sektor, yang bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengatasi masalah atau situasi yang kompleks dan beragam” (Choi T. &., 2014). Pengaturan kelembagaan, yang berfokus pada kolaborasi antara pemerintah dan warga negara, memiliki label yang berbeda, seperti *new public governance* (Osborne, 2006), *network governance* (Provan, 2008), *collaborative planning* (Innes J. E., 2010),

kolaborasi lintas sektor (Bryson J. M., 2006), dan *collaborative public management* (O'Leary, 2012).

Collaborative governance, pada dasarnya ada untuk menyatukan pemangku kepentingan umum dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga public untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi consensus (Gash, 2007). Dalam teori dan praktek tentang *collaborative governance*, Ansell dan Gash mendefinisikan sebagai:

“A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.”

Definisi tersebut dapat dirumuskan beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik, antara lain :

- a. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.
- b. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik.
- c. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik.
- d. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama- sama.
- e. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan

bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.

- f. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik. Defenisi ini dapat dimaknai bahwa forum tersebut ada pada sebuah keterkaitan formal sehingga disebutkan hanya berkisar pada kerjasama antara lembaga publik, aktor publik dengan aktor non publik.

(Emerson, 2012) menawarkan definisi yang lebih luas yaitu sebagai suatu proses dan struktur dari pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif antar badan-badan publik, berbagai tingkat pemerintahan dan atau pada ranah publik, swasta dan masyarakat sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali melalui forum bersama". Dengan kata lain kolaborasi membahas mengenai kerjasama dua atau lebih stakeholder untuk mengelola sumber daya yang sama yang sulit dicapai secara individual.

Sementara itu Robertson dan Choi; (Kumorotomo, 2013) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian di mana setiap peserta di dalamnya memiliki otoritas substansi dalam pengambilan keputusan dan setiap stakeholder memiliki kesempatan yang sama untuk mengintegrasikan aspirasinya dalam proses tersebut. Satu komponen penting dari *collaborative governance* adalah "governance" banyak di penelitian yang telah membangun definisi *governance*, akan tetapi definisi tersebut masih terbatas dengan apa yang

telah dikerjakan oleh pemerintah dan diflasikan olehnya, namun belum komprehensif. (Lynn, 2006).

Menurut (Zeckhauser, 2011, p. 4) *Collaborative Governance* merupakan kondisi yang mana pemerintah untuk memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu. Hal ini juga senada dengan (Holzer, 2012, p. 349) yang menyatakan *Collaborative Governance* adalah kondisi ketika pemerintah dan swasta berupaya mencapai suatu tujuan bersama untuk masyarakat yang dimana dalam hal ini pemerintah dan swasta sama-sama mempunyai tujuan yang sama untuk publik.

Collaborative governance adalah jenis “*governance*” yang mendorong upaya bersama dari pemangku kepentingan dan non-state untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan kolektif dan implementasi (Gray, 1989); (Bingham, 2008); (Farazmand, 2004). Memasukkan pemangku kepentingan yang relevan ke dalam *collaborative governance* untuk mendorong pengambilan keputusan kolektif dan mengatasi masalah kompleks secara efektif (Bryson J. M., 2006); (Allison, 2004). Oleh karena itu, tata kelola kolaboratif mendorong pemecahan masalah bersama dengan melibatkan pemangku kepentingan utama dan alternatif untuk manajemen top-down, pembuatan dan implementasi kebijakan.

Collaborative governance umumnya digunakan saat ini, untuk membantu mengatasi tantangan yang terkait dengan lingkungan, penegakan hukum, kerawanan pangan, kesehatan, pembangunan, sosial,

ekonomi, keamanan nasional, pengelolaan sumber daya alam, dan banyak lainnya karena peluang untuk bersama, dan tindakan berkelanjutan (Agbodzakey J. ..., 2012); (Choi T. &, 2014); (Daniel, 2013).

Terkait dengan itu, *collaborative governance* memiliki tantangan juga karena sifat keterlibatan multi-stakeholder. Tantangan seperti konflik terkait proses, pertempuran wilayah, kendala waktu dan sumber daya, ketidakseimbangan kekuatan, masalah bertahan, dan keputusan yang tertunda tidak dapat dihindari (Agbodzakey J. &, 2019); (Margerum, 2011); (Daniel, 2013); (Metze, 2012). Namun secara bersama-sama, *collaborative governance* dapat diterima dibandingkan dengan manajemen tradisional yang dikaitkan dengan pengaturan birokrasi yang khas (Innes J. E., 2006); (Freeman, 1997).

Dalam *good governance*, peserta seperti aktor sosial dan pemerintah diperlakukan sama dan otonom (Booher, 2004), dan keputusan kolektif dibuat bukan dengan pemungutan suara tetapi melalui konsensus (Chambers, 2003). Singkatnya, *good governance* adalah jalan dimana demokrasi partisipatif dicapai di bidang konflik sosial, pembangunan lokal, dan perlindungan lingkungan.

2. Komponen-Komponen *Collaborative Governance*

Kolaborasi memiliki komponen-komponen yang menjadi kunci keberhasilan dari kolaborasi itu sendiri. Komponen-komponen tersebut saling melengkapi satu sama lain, sehingga kolaborasi akan berhasil apabila memenuhi semua komponen.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa komponen kolaborasi:

a. Robert Agranoff dan Michael McGuire

Agranoff dan McGuire melihat kolaborasi dapat menggunakan komponen yang disebutkan sebagai berikut:

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan bagian penting dalam kolaborasi yang perlu dilakukan secara langsung dan intensif. Komunikasi kolaborasi bisa dilaksanakan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi kolaborasi secara tidak langsung dilakukan melalui online atau perantara teknologi misalnya zoom dan lainnya. Komunikasi secara tidak langsung dapat digunakan sebagai solusi komunikasi antar stakeholders yang sedang berkonflik.

2) Nilai tambah

Nilai yang dihasilkan dari proses efisiensi, adanya demokrasi dalam setiap institusi dan adanya proses kolaborasi. Dalam menciptakan nilai publik juga terdapat permasalahan yang muncul meliputi tingkat kepentingan masing-masing, urgensi, batas ruang lingkup yang meranah pada posisi lintas-sektoral, yang memberikan kesadaran mengenai pemerintah belum mampu menciptakan bagian yang dinilai penting dari nilai publik atau nilai public yang ada, hal ini membuat diperlukannya kolaborasi diluar instansi pemerintah.

3) Deliberasi

Deliberasi diartikan sebagai bentuk kelebihan dan kekurangan dalam kolaborasi yang memberikan pelajaran timbal balik menguntungkan (*mutual learning*), membangun komunitas (*building communities*) serta memanfaatkan proses interaktif (*employing interactive*).

b. Ann Marie Thomson dan James L. Perry

Dalam tulisannya yang berjudul "*Collaboration Processes: Inside The Black Box*" memiliki pendapat mengenai 5 (lima) kunci dimensi kolaborasi, yaitu sebagai berikut:

1) Dimensi Tata Pemerintahan (*The Process of Collaborative Governing: The Governance Dimension*)

Dimensi tata pemerintahan merupakan dimensi tentang pengambilan keputusan yang dilakukan bersama (*joint decision making*), pemberian kemampuan, dan pemecahan masalah. Dimensi ini memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti (1) Struktur hirarki dan otoritas tidak mendominasi; (2) Kesadaran mengenai stakeholders yang berkolaborasi bukan hanya bertanggung jawab langsung untuk membangun kesepakatan namun juga wajib memberikan paksaan terkait keputusan terhadap diri mereka sendiri. (3) Ketersediaan sebagai penerimaan bahwa seluruh stakeholders yang terlibat dalam kolaborasi memiliki hak untuk menerima bahwa semua pihak yang berkolaborasi memiliki peran yang sah sehingga akan didapatkan hasil yang mencerminkan terbentuknya konsensus kelompok, tidak berupa kekuatan koalisi maupun kekuatan politik; (4) Pemahaman tentang pemerintahan

yang harus mampu menekan keterbukaan informasi, menghargai pendapat stakeholders lain , dan adanya proses negosiasi yang dilalui untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama.

2) Dimensi Administrasi (*The Process of Collaborative: The Administration Dimension*)

Dimensi administrasi merupakan dimensi yang sangat penting untuk keberlangsungan hubungan antar stakeholders yang melakukan kolaborasi. Adanya struktur administrasi saat melakukan kolaborasi merupakan posisi sentral dimana digunakan untuk proses koordinasi komunikasi, proses pengorganisasian dan proses penyebaran informasi serta berupaya agar stakeholders yang melakukan kolaborasi secara bersama-sama melakukan pengaturan mengenai hubungan yang dijalin oleh mereka, kemudian Freitag dan Winkler menyebutnya sebagai “sosial koordinasi”.

Indikator yang terdapat dalam dimensi administrasi meliputi adanya peran yang jelas, kejelasan tanggung jawab yang dimiliki oleh aktor, pertemuan untuk kerjasama berjalan efektif, adanya kejelasan tujuan yang dicapai, pengkoordinasian tugas yang dilakukan dengan baik, memiliki saluran komunikasi yang resmi, serta melakukan pengawasan selama pelaksanaan kolaborasi (Thomson, 2006); (Fairuza, 2017)

3) Dimensi Otonomi (*The Process of Reconciling Individual and Collective Interest: The Autonomy Dimension*)

Dimensi otonomi berkaitan dengan hubungan yang bertentangan antara kontrol bersama dengan kontrol individu. Selama berlangsungnya kolaborasi, stakeholders yang terlibat untuk melindungi identitas masing-masing yaitu dengan melakukan kontrol terhadap individu. Bertentangan dengan kontrol individu, kontrol bersama melibatkan ketersediaan kolaborator untuk memberikan informasi, tidak sekedar tentang aktivitas organisasi mereka, namun juga berhubungan dengan apa yang mereka mampu dan tidak mampu dalam melakukan kolaborasi. Dimensi otonomi mencoba untuk memahami krisis yang implisit antara keinginan masing-masing stakeholders dan keinginan bersama. Indikator yang dimiliki dimensi otonomi ini berhubungan dengan tingkat pemahaman stakeholders mengamati kolaborasi sebagai penghalang bagi pencapaian misi organisasi, adanya kepercayaan mengenai keuntungan yang dipengaruhi oleh proses kolaborasi, kesadaran stakeholders untuk berupaya mewujudkan harapan yang dimiliki oleh organisasi serta harapan yang berasal dari stakeholders lain dalam kolaborasi.

4) Dimensi Mutualitas (*The Process of Forging Mutually Beneficial Relationship: The Mutuality Dimension*)

Dimensi mutualitas berdasar pada hubungan ketergantungan. Setiap organisasi harus mampu menjalani hubungan saling ketergantungan ketika dalam kepentingan yang sama ataupun kepentingan yang berbeda,

yang selanjutnya disebut oleh Powell; (Fairuza, 2017) sebagai “*complementarities*”. Komplementaritas adalah situasi ketika suatu organisasi mampu memberikan pengorbanan haknya guna mendapatkan kekuatan dari organisasi lainnya demi memenuhi kepentingan milik mereka sendiri. Adanya saling ketergantungan dalam kolaborasi adalah dasar penting bagi hubungan stakeholders supaya berjalan dengan baik.

5) Proses Membangun Norma Sosial: Kepercayaan dan Dimensi Timbal Balik (*The Process of Building Social Capital Norms: The Trust and Reciprocity Dimension*)

Suatu kolaborasi yang dilaksanakan stakeholders akan menunjukkan mengenai kesiapan dalam berinteraksi ketika berkolaborasi, apabila stakeholders yang lain menunjukkan kesiapan yang sama, hal ini disebut sebagai hubungan timbal balik yang akan membangun kepercayaan antar stakeholders yang terlibat untuk berkolaborasi apabila dilakukan secara berulang-ulang. Kepercayaan antar stakeholders yang berkolaborasi mampu memberi manfaat bagi keberlangsungan kolaborasi, yaitu:

- (1) membangun itikad dengan baik, stakeholders dalam kolaborasi mampu berperilaku sesuai dengan komitmen eksplisit dan implisit,
- (2) berperilaku jujur dalam proses negosiasi dalam bentuk apapun;
- (3) stakeholders yang melakukan kolaborasi tidak untuk mengambil keuntungan yang lebih walaupun memiliki kesempatan (*Cummings dan Bromiley*).

c. Debbie Roberts, Rene van Wyk, dan Nalesh Dhanpat

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan oleh (Debbie Roberts, 2016) Debbie Roberts, Rene van Wyk, dan Nalesh Dhanpat yang berjudul "*Exploring Practices for Effective Collaboration*" terdapat lima kunci keefektifan kolaborasi, yaitu sebagai berikut:

1) Tujuan Umum (*common purpose*)

Visi bersama adalah bagian penting dari kolaborasi yang dapat menyatukan semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Stakeholders yang terlibat harus saling berbagi pemahaman dan satu visi mengenai apa yang dapat mereka capai dengan dilakukannya kolaborasi. Tujuan adalah faktor kunci keberhasilan kolaborasi. Tujuan bersama akan membawa dan menjaga kelompok tetap bersama.

2) Mutualitas (*mutuality*)

Mutualitas muncul ketika masing-masing stakeholders memberikan kontribusi sumber daya sehingga pihak lainnya memperoleh manfaat. Sumber daya ini termasuk orang, dana dan bahan. Contohnya melakukan tukar informasi. Kesamaan misi, budaya, dan komitmen terhadap tujuan kolaborasi mampu membantu memfasilitasi pertukaran sumberdaya.

Kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari adanya saling ketergantungan antar para aktor yang terlibat, karena masing-masing aktor memiliki jenis dan tingkat teknologi serta sumber daya yang berbeda beda yang dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan masing masing. Saling ketergantungan ini mendorong peningkatan frekuensi dan intensitas

komunikasi antara aktor-aktor, sehingga pada gilirannya memaksa mereka agar keputusan dapat dibuat bersama dan menerapkan langkah-langkah secara bersama-sama (Alter, 1993).

Semakin besar saling ketergantungan antar aktor, baik secara vertikal maupun horizontal, maka akan semakin besar pula kebutuhan akan saling berkoordinasi dan berkolaborasi.

3) Lingkungan yang memungkinkan (*enabling environment*)

Lingkungan kolaboratif meliputi lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin kolaborasi. Lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang relatif kuat terhadap kinerja para stakeholders dalam menjalankan proses kolaborasi. Kepemimpinan memberikan kontribusi yang penting untuk menciptakan dan memelihara sebuah lingkungan kolaboratif dengan menggabungkan keahlian dan pengetahuan para stakeholders yang terlibat. Pemimpin kolaborasi harus memiliki kredibilitas dan mendapatkan penerimaan dari kelompok.

4) Kepercayaan (*trust*)

Kepercayaan adalah suatu faktor yang paling mendasari keberhasilan kolaborasi. Kepercayaan didasarkan pada keyakinan bahwa para stakeholders akan berperilaku jujur menjalankan perjanjian dan mematuhi komitmen yang sudah mereka buat serta tidak melakukan eksploitasi terhadap pihak lain. Adanya kontrol formal yang berlebihan dalam kolaborasi dapat berdampak pada kurangnya kepercayaan antar

stakeholders karena kontrol dipandang sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap kemampuan dan karakter para stakeholders.

5) Karakteristik pribadi tertentu (*specific personal characteristics*)

Dalam melakukan proses kolaborasi, para stakeholders harus saling terbuka dan mampu memahami motif dan kepentingan stakeholders lain. Pemahaman karakteristik stakeholders yang berkolaborasi dapat memicu tumbuhnya kompromi sebagai bentuk konsekuensi dari proses pembuatan keputusan bersama yang didalamnya terdapat kepentingan stakeholders yang tidak terjawab dalam pengambilan keputusan tersebut. Mengingat banyaknya keputusan yang terlibat dalam kolaborasi, yang tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan semua orang, kemampuan untuk berkompromi merupakan karakteristik penting yang dibutuhkan oleh kolaborator.

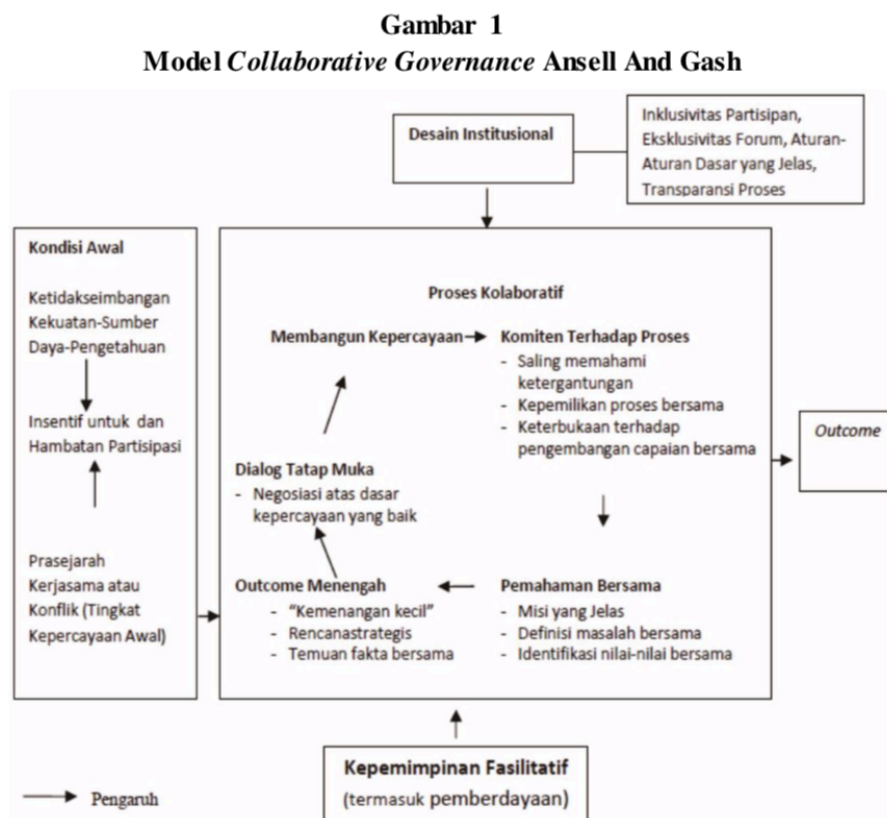
Dari beberapa teori mengenai komponen-komponen *collaborative governance*, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori keefektifan kolaborasi oleh (Debbie Roberts, 2016). Hal ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keefektifan kolaborasi yang dilakukan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone. Teori Debbie Roberts juga memiliki kecenderungan yang sama dengan kolaborasi yang dilakukan antara stakeholders dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone yaitu memiliki tujuan, mutualitas, serta kepercayaan, karena tanpa adanya saling kepercayaan maka kolaborasi tidak akan berjalan dengan efektif.

3. Model-Model dan Proses *Collaborative Governance*

Proses dari suatu kolaborasi dilakukan dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Meskipun proses kolaboratif sulit untuk dilaksanakan karena karakter-karakter dari tiap stakeholder yang berbeda satu dengan yang lainnya.

- 1) Proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash (Gash, 2007) sebagai berikut:

Gambar 1 Model Collaborative Governance Ansell dan Gash



Sumber: Ansell & Gash, 2007:550

a) Dialog tatap muka (*Face to face dialogue*)

Semua bentuk *collaborative governance* dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari tiap stakeholder yang terlibat. Sebagaimana *collaborative governance* yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara tatap muka langsung bukanlah semata-mata merupakan negosiasi yang ala kadarnya. Dialog secara langsung ini dapat meminimalisir antagonisme dan disrespect dari antar stakeholder yang terlibat. Sehingga, stakeholder dapat bekerja sama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatan bersama.

Suatu kegiatan dapat dikatakan telah melewati tahap *face to face dialogue* dalam proses kolaborasi ialah ketika pertemuan antar pemangku kepentingan rutin dilakukan. Sehingga eksplorasi keuntungan bersama tidak hanya akan berhenti pada pertemuan pertama. Ini adalah inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, berbagi pemahaman, dan komitmen terhadap proses.

b) Membangun kepercayaan (*Trust building*)

Buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negosiasi antar stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para stakeholder tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam

membangunan kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi.

c) Komitmen terhadap proses kolaborasi (*Commitment to process*)

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari stakeholder supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.

Komitmen terhadap proses kolaboratif membutuhkan kesediaan di muka untuk mematuhi hasil musyawarah, bahkan jika mereka harus pergi ke arah yang pemangku kepentingan tidak sepenuhnya mendukung. Tentu saja, dasar konsensus pemerintahan kolaboratif sangat mengurangi risiko bagi pemangku kepentingan. Namun dinamika tawar-menawar dapat mengarah ke arah yang tidak terduga, dan pemangku kepentingan dapat mengalami tekanan untuk menyesuaikan dengan posisi yang tidak mereka rangkul sepenuhnya.

Hal ini mudah dilihat mengapa kepercayaan adalah elemen kolaborasi yang begitu penting. Komitmen tergantung pada percaya bahwa pemangku kepentingan lain akan menghormati perspektif dan kepentingan bersama. Hal ini juga mudah untuk melihat bagaimana prosedur yang jelas, adil, dan transparan sangat penting untuk komitmen. Sebelum

berkomitmen pada proses yang dapat berjalan ke arah yang tidak dapat diprediksi, pemangku kepentingan harus merasakan yakin bahwa prosedur musyawarah dan negosiasi memiliki integritas. Rasa komitmen dan kepemilikan dapat ditingkatkan seiring meningkatnya keterlibatan.

d) Pemahaman bersama (*Share Understanding*)

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (stakeholder) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

Pengembangan pemahaman bersama dapat dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran kolaboratif yang lebih besar. Berkembangnya strategi survei yang berguna untuk menilai sejauh mana pembelajaran kolektif yang dihasilkan dari kolaborasi. Kategori yang menentukan sebuah kegiatan kolaborasi dalam tahap pemahaman bersama, setiap pemangku kepentingan harus mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi dari kegiatan kolaborasi, membagi permasalahan tersebut kepada semua aktor yang terlibat dan setiap aktor juga harus memberikan solusi terkait permasalahan yang sedang dihadapi sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap proses.

e) Hasil sementara (*Intermediate outcomes*)

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. *Intermediate outcomes* ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan ketika “*small wins*” dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi.

Pertimbangan ini menuntun kita untuk menarik kesimpulan berikut: Jika antagonism sebelumnya tinggi dan komitmen jangka panjang diperlukan, maka hasil sementara yang menghasilkan *small wins* itu penting. Jika dalam keadaan seperti ini pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan tidak dapat mengantisipasi *small wins* ini, maka mereka mungkin tidak boleh memulai jalur kolaboratif. *Small wins* mungkin bukan strategi yang tepat untuk membangun kepercayaan dimana pemangku kepentingan memiliki tujuan yang lebih ambisius yang tidak dapat dengan mudah diurai menjadi hasil sementara.

2) Proses *Collaborative Governance* menurut Emerson, Nabatchi Dan Balogh

Berbagai komponen yang menjadi proses kolaborasi diantaranya adalah 1) dinamika kolaborasi, 2) tindakan-tindakan kolaborasi, dan 3) dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi.

a. Dinamika kolaborasi

Beberapa ilmuwan menggambarkan proses kolaborasi sebagai sebuah tahapan linier yang terjadi dari waktu ke waktu dimulai dari pendefinisian masalah menuju setting agenda hingga implementasi. Berlawanan dengan (Gash, 2007); (Thomson, 2006); (Emerson, 2012) melihat dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang oriteratif. Emerson fokus pada tiga komponen interaksi dari dinamika kolaborasi. Komponen tersebut antara lain: Penggerakan prinsip bersama (*Principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*) dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*).

b. Tindakan-tindakan dalam Kolaborasi (*Actions*)

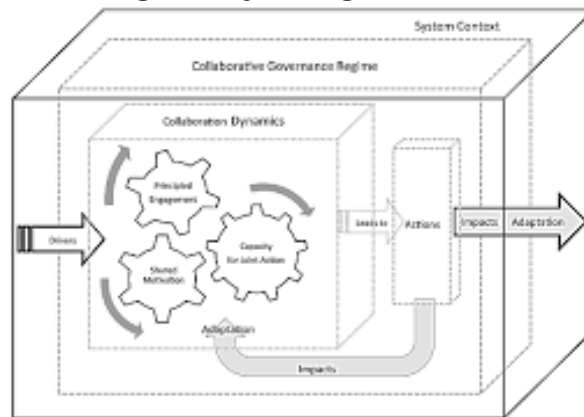
Tindakan kolaborasi dilatarbelakangi oleh pemikiran mengenai sulit tercapainya tujuan jika hanya satu kelompok atau organisasi yang bertindak sendiri (Agranoff, 2003). Tindakan-tindakan dalam kolaborasi merupakan inti dari kerangka *Collaborative Governance*. Namun banyak peneliti yang kurang mengkaji dan memperhatikan lebih mendalam mengenai tindakan- tindakan kolaborasi (Thomas dan Koontz dalam (Emerson, 2012). Menurut Innes dan Booher (dalam (Emerson, 2012) tindakan- tindakan kolaborasi merupakan hasil utama dari proses kolaborasi linier yang terkadang dikaitkan dengan dampak. Hal ini dikarenakan pada dasarnya proses dan hasil tidak dapat dipisahkan dari dampak itu sendiri.

c. Dampak dan Adaptasi Hasil Tindakan pada Dinamika Kolaborasi
(*Impacts and Adaptation for Collaboration Dynamics*)

Dampak dalam CGR yang dimaksud adalah dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Karakteristik dampak ada yang diharapkan, yang tidak diharapkan, serta tidak terduga. Dampak yang diharapkan adalah "*small-wins*" yaitu hasil-hasil positif yang terus memperlangsungkan semangat para aktor. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. Dampak tidak terduga juga dapat muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi.

Berbagai dampak tersebut menghasilkan umpan balik atau *feedback*, yang kemudian diadaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud adalah bagaimana kolaborasi menyikapi *feedback* dari masing-masing aktor yang ada. Adaptasi yang baik adalah yang sekiranya dapat dilakukan oleh seluruh aktor kolaborasi, artinya tidak ada pengaruh kepentingan organisasi di atas kolaborasi, sehingga menyebabkan terjadinya usaha mengambil manfaat kolaborasi secara lebih untuk kepentingan organisasi sendiri. Adaptasi harus berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan utama untuk diubah di dalam kolaborasi, sehingga dari hal tersebut dapat menjaga kemajuan kolaborasi, dan hal ini dipengaruhi oleh keterbukaan dari kolaborasi itu sendiri.

Gambar 2 Kerangka kerja integrative untuk Collaborative Governance



3) Proses kolaborasi (Ratner.Assessment., 2012)

Selanjutnya menurut Ratner, di dalam *collaborative governance* terdapat tiga fokus fase atau tiga tahapan yang merupakan proses kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan. (Ratner.Assessment., 2012); (Irawan, 2017) dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3 Tiga Tahap Proses Collaborative Governance dan Action Planning



Berdasarkan gambar 3, maka dapat diketahui tiga tahap tersebut meliputi:

a) *Identifying Obstacles and Opportunities* (Fase Mendengarkan)

Pada tahap ini pemerintah dan stakeholders atau pemangku kebijakan yang melakukan kolaborasi yaitu pihak swasta dan masyarakat, akan melakukan identifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses tata kelola pemerintahan. Pada tahap ini setiap stakeholders saling menerangkan mengenai permasalahan dan stakeholders lain saling mendengarkan setiap permasalahan yang diterangkan oleh setiap stakeholders yang terlibat. Kemudian memperhitungkan mengenai peluang dalam penyelesaian setiap permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti solusi dari permasalahan yang akan terjadi. Setiap stakeholders memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan kebijakan pada setiap permasalahan yang telah diidentifikasi dan memperhitungkan peluang berupa achievement yang dapat diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat.

Pada dasarnya, fase ini merupakan fase saling mendengarkan mengenai permasalahan dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan dari setiap permasalahan yang diterangkan oleh masing-masing stakeholders.

b) *Debating Strategies For Influence* (Fase Dialog)

Pada tahap ini, stakeholders atau pemangku kebijakan yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah diterangkan pada fase pertama. Diskusi yang dilakukan oleh masing-masing stakeholders yang terlibat meliputi diskusi mengenai langkah yang dipilih sebagai langkah yang paling efektif untuk memecahkan permasalahan. Kemudian mendiskusikan mengenai

pihak-pihak yang mampu mendukung penyelesaian permasalahan dalam tata kelola pemerintahan yang telah diterangkan.

c) *Planning Collaborative Actions* (Fase Pilihan)

Setelah melalui tahap mendengarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam proses tata kelola pemerintahan dan melakukan diskusi mengenai penentuan strategi yang efektif untuk mengantisipasi permasalahan, pada tahap ini stakeholders atau pemangku kebijakan yang terlibat akan mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah didiskusikan pada tahap sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dilakukan dalam proses kolaborasi antar stakeholders yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Kemudian mengidentifikasi pengukuran setiap proses yang dilakukan dan menentukan langkah untuk menjaga proses kolaborasi agar terus berlangsung dalam jangka panjang.

C. Definisi Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Dalam kamus ilmiah, efektivitas diartikan sebagai ketetapan, hasil guna, atau menunjang tujuan. Secara umum, efektivitas dapat dipahami sebagai seberapa jauh suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya telah tercapai, dan konsep efektivitas biasanya berkaitan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat atau derajat dalam mencapai tujuan yang diharapkan (Edy, 2011); (Anis, 2021).

Robbins dalam (Tika, 2010, p. 129) memberikan definisi efektivitas adalah apa yang dicapai dalam suatu organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Demikian pula, pendapat dari A.F Stoner dalam (Nawawi, 2013, p. 190) mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai.

Richard L. Daft dalam (Priansa, 2013, p. 11) mengungkapkan bahwa efektivitas adalah sejauh mana suatu organisasi mencapai tujuannya. Komaruddin dalam (Mutiarin, 2014, p. 96) efektivitas adalah sejauh mana suatu kegiatan manajemen berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

D. Konsep Stunting

1. Definisi Stunting

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya (Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1995/Menkes/XII/2010)

Stunting tubuh pendek pada masa anak-anak (*Childhood stunting*) merupakan akibat kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan di masa lalu dan digunakan sebagai indikator jangka panjang untuk gizi kurang pada anak. *Childhood stunting* berhubungan dengan gangguan perkembangan neurokognitif dan risiko menderita penyakit tidak menular di masa depan (Kemenkes RI| Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015).

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak pada saat anak berusia dua tahun. Meningkatnya angka kematian bayi dan anak terjadi karena kekurangan gizi pada usia dini yang dapat menyebabkan penderita mudah sakit dan memiliki postur tubuh tidak maksimal saat dewasa (Millenium Challengga Account Indonesia, 2013).

Stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang mana disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya, kekurangan gizi terjadi pada saat bayi masih berada di dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, akan tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan anak, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan

kemiskinan (Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2018).

Stunting merupakan bentuk dari proses pertumbuhan anak yang terhambat, yang termasuk salah satu masalah gizi yang perlu mendapat perhatian (Picauly, 2013).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stunting

Menurut (UNICEF, 2006) Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Individu

1) Asupan zat gizi kurang

Masalah gizi yang dapat terjadi pada balita adalah tidak seimbangnya antara jumlah asupan makan atau zat gizi yang diperoleh dari makanan dengan kebutuhan gizi yang dianjurkan pada balita misalnya Kekurangan Energi Protein (KEP) (Puspasari, 2017).

2) Penyakit infeksi

Kejadian infeksi merupakan suatu gejala klinis penyakit pada anak yang akan mempengaruhi pada penurunan nafsu makan anak., sehingga asupan makanan anak akan berkurang. Apabila terjadi penurunan asupan makan dalam waktu yang lama dan disertai kondisi muntah dan diare, maka anak akan mengalami zat gizi dan cairan. Hal ini akan berdampak pada penurunan berat badan anak yang semula memiliki status gizi yang baik sebelum mengalami penyakit infeksi menjadi status gizi kurang. Apabila

kondisi tersebut tidak termanajemen dengan baik maka anak akan mengalami gizi buruk (Yustianingrum, 2017). Kejadian penyakit infeksi yang berulang tidak hanya berakibat pada menurunnya berat badan atau rendahnya nilai indikator berat badan menurut umur, tetapi juga akan berdampak pada indikator tinggi badan menurut umur (Welasasih, 2012).

3) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat badan lahir dikategorikan menjadi BBLR dan normal sedangkan panjang badan lahir dikategorikan pendek dan normal. Balita masuk dalam kategori BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), jika balita tersebut memiliki berat badan lahir kurang dari 2500 gram sedangkan kategori panjang badan lahir kategori pendek jika balita memiliki panjang badan lahir kurang dari 48 cm (Ngaisyah R. D., 2016).

b. Faktor Pengasuh/Orang Tua

1) Pengetahuan dan sikap

Pengetahuan gizi yang kurang atau kurangnya menerapkan pengetahuan gizi dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan masalah gizi pada seseorang. Tingkat pengetahuan gizi seseorang akan sangat berpengaruh terhadap sikap dan tindakan dalam memilih makanan yang akan berpengaruh terhadap gizi. Pengetahuan tentang gizi orang tua terutama ibu sangat berpengaruh terhadap tingkat kecukupan gizi yang diperoleh oleh balita. Pengetahuan gizi ibu yang baik akan meyakinkan ibu untuk memberikan tindakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi balita, terutama yang berkaitan dengan kandungan zat-zat dalam makanan,

menjaga kebersihan makanan, waktu pemberian makan dan lain-lain, sehingga pengetahuan yang baik akan membantu ibu atau orang tua dalam menentukan pilihan kualitas dan kuantitas makanan. Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap ibu merupakan faktor yang tidak langsung yang dapat mempengaruhi status gizi balita (Rahmatillah, 2018).

2) Ketahanan pangan

Akses pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dipengaruhi oleh pendapatan yang rendah. Upaya peningkatan pendapatan maupun kemampuan daya beli pada kelompok terdampak rentan pangan merupakan kunci untuk meningkatkan akses terhadap pangan (Jayarni, 2018).

3) Pola asuh

Pola asuh anak merupakan perilaku yang dipraktikkan oleh pengasuh anak dalam pemberian makan, pemeliharaan kesehatan, pemberian stimulasi, serta dukungan emosional yang dibutuhkan anak untuk proses tumbuh kembangnya. Kasih sayang dan tanggung jawab orang tua juga termasuk pola asuh anak (Asrar, 2009)

c. Faktor Lingkungan

1) Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan yang baik pada balita akan meningkatkan kualitas pertumbuhan dan perkembangan balita, baik pelayanan kesehatan ketika sehat maupun saat dalam kondisi sakit. Pelayanan kesehatan anak balita merupakan pelayanan kesehatan bagi anak berumur 12–59 bulan

yang memperoleh pelayanan sesuai standar, meliputi pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, pemberian vitamin A, 2 kali setahun (Kemenkes, 2016). Keaktifan balita ke posyandu sangat besar pengaruhnya terhadap pemantauan status gizi. Kehadiran balita ke posyandu menjadi indikator terjangkaunya pelayanan kesehatan pada balita, karena balita akan mendapatkan penimbangan berat badan, pemeriksaan kesehatan jika terjadi masalah, pemberian makan tambahan dan penyuluhan gizi serta mendapat imunisasi dan program kesehatan lain seperti vitamin A dan kapsul yodium. Balita yang mendapatkan program kesehatan dasar maka diharapkan pertumbuhan dan perkembangannya terpantau, karena pada masa balita terjadi rawan/rentan terhadap infeksi dan rentan terkena penyakit gizi. Anak yang sehat bukan karena anak semakin gemuk tetapi anak yang juga mengalami kenaikan karena pertambahan tinggi (Welasasih, 2012)

2) Sanitasi lingkungan

Akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang buruk dapat meningkatkan kejadian infeksi yang dapat membuat energi untuk pertumbuhan teralihkan kepada tubuh perlawanan tubuh menghadapi infeksi, gizi sulit diserap oleh tubuh dan terhambatnya pertumbuhan (Kemenkes, 2016). Faktor sanitasi dan kebersihan lingkungan berpengaruh pada tumbuh kembang anak, karena pada usia anak-anak rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit. Paparan terus menerus terhadap kotoran

manusia dan binatang dapat menyebabkan infeksi bakteri kronis. Infeksi tersebut disebabkan oleh praktik sanitasi dan kebersihan yang kurang baik yang membuat gizi sulit diserap oleh tubuh. Salah satu pemicu gangguan saluran pencernaan yaitu sanitasi dan kebersihan lingkungan yang rendah. Hal tersebut membuat energi untuk pertumbuhan teralihkan kepada perlawanan tubuh menghadapi infeksi (Millenium Challengga Account Indonesia, 2013).

Penyebab stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Namun karena banyak faktor diantaranya sebagai berikut. 1. Berat Badan Lahir Berat badan lahir dikelompokkan menjadi tiga yaitu berat badan lahir rendah (BBLR) (stunting. Namun belum ditemukan penyebab mengapa laki-laki lebih berisiko mengalami stunting. 3. Urutan Lahir (Moges, 2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa anak yang urutan lahirnya lebih berisiko dibandingkan yang berurutan lahir pertama. Dalam penelitian ini, peneliti pun mengemukakan penyebab yang mungkin merupakan penyebab mengapa anak dengan urutan lahir lebih dari satu kemungkinan mengalami stunting. Hal ini dikarenakan anak yang lahir di urutan di atas satu tidak bisa bisa secara optimal untuk dipenuhinya gizi balita dikarenakan terpecahnya perhatian ibu dengan anak yang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh (Woldie, 2015) menemukan ada hubungan urutan kelahiran yang lebih tinggi terhadap stunting

dibandingkan urutan lahir yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian ini. Namun, bila dilihat dari hasil analisis secara jelas dapat pula dilihat bahwa anak yang lahir urutan pertama juga berisiko mengalami stunting.

4. Pemberian Makan Pemberian makan bertujuan untuk tumbuh kembang manusia. Pemberian makan pada balita biasanya dilakukan dengan memberi air susu ibu (ASI) dan makanan pendamping ASI (MPASI). Pemberian ASI yang tidak eksklusif pada anak akan membuat anak berisiko lebih besar terkena stunting (Indrawati, 2016). (Saputri, 2019) dalam penelitiannya juga menemukan pemberian ASI yang tidak eksklusif dapat mendorong terjadinya stunting. Selain pemberian ASI stunting juga dapat dipengaruhi oleh pemberian MPASI pada anak dengan usia >6 bulan. (Teferi, 2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa pemberian makanan pendamping ASI pada anak kurang atau lebih dari 6 bulan lebih besar risikonya mengalami stunting dibandingkan dengan anak yang pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6 bulan. Namun, selain memberi makanan pendamping di usia 6 bulan harus pula diperhatikan jumlah dan kualitas gizi makanan yang diberikan. Pada masa pertumbuhan seperti saat memasuki usia balita sangat dianjurkan banyak mengonsumsi makanan yang bersumber dari protein, disamping itu tetap membiasakan mengonsumsi buah dan sayur.

Dalam memberi satu porsi makanan baiknya terdapat sayur dan buah, protein nabati maupun hewani dan juga protein harus lebih banyak daripada karbohidrat.

5. Riwayat Penyakit Infeksi Penyakit infeksi adalah

penyakit yang disebabkan oleh hygiene yang buruk yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan. Jika proses penyerapan nutrisi terganggu dan tidak diseimbangi dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhannya, maka akan mengakibatkan stunting. (do Rosario Pacheco, 2017) dalam penelitiannya menemukan riwayat penyakit infeksi dapat meningkatkan kejadian stunting pada anak. 6. Riwayat Pemberian Imunisasi Banyak anak yang di Indonesia yang imunisasinya belum lengkap. Ketidaklengkapan imunisasi tersebut dimuat dalam (Riskesdas, 2018) yang menunjukkan hanya 57,9 anak yang menerima imunisasi lengkap.

(Lisanu Mazengia, 2018) dalam penelitiannya menemukan imunisasi yang kurang lengkap dapat meningkatkan kejadian stunting pada anak. Anak-anak yang kurang imunisasinya lebih mudah mengalami stunting. 7. Usia Ibu saat Melahirkan (Mesfin, 2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa ibu yang lebih muda saat melahirkan lebih berisiko memiliki anak stunting dibandingkan dengan yang ibu yang yang berusia lebih tua. Hal ini dikarenakan ibu yang lebih muda masih belum memiliki pengalaman dan mental yang kuat dalam mengasuh bayi. 8. Pendidikan Ibu (Mulenga, 2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan ibu merupakan salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi kejadian stunting pada anak. Ibu dengan pendidikan tinggi akan lebih mudah untuk memahami perawatan anak dengan baik, terutama pada pemberian makan. Ibu dengan

pendidikan lebih tinggi cenderung memilih bahan makan yang berkualitas untuk mereka hidangkan.

Dalam penelitian (Apriliana, 2018) menemukan bahwa ibu dengan pendidikan lebih rendah lebih berisiko memiliki anak stunting dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. 9. Pekerjaan Ibu Dalam keluarga peran ibu sangat penting terutama dalam mengurus mengasuh anak, konsumsi keluarga serta memperbaiki gizi keluarga terutama gizi anak dan bayi. Ibu yang bekerja memiliki durasi lebih singkat dalam melakukan perannya sebagai ibu terutama dalam pemberian asupan gizi bagi anaknya. Anak yang asupannya kurang lebih berisiko mengalami kelambatan dalam pertumbuhan. (Mesfin, 2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa ibu yang bekerja berisiko 1,71 kali lebih besar memiliki anak yang mengalami stunting dibandingkan dengan ibu keluarga. Hal sama juga ditemukan oleh (Garcia Cruz, 2017) yang menemukan bahwa ibu pekerjaan yang bekerja lebih berisiko tinggi memiliki anak stunting. 10. Jumlah Anggota Keluarga Anggota keluarga adalah semua orang yang bertempat tinggal yang sama.

Banyaknya jumlah anggota dalam keluarga akan mempengaruhi konsumsi pangan. Jumlah anggota keluarga yang banyak yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan keluarga akan mengakibatkan konsumsi pangan yang tidak merata di dalam keluarga. (Putri R. F., 2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa banyaknya jumlah anggota

keluarga akan mempengaruhi status gizi. Kondisi status gizi yang kurang pada keluarga terutama pada ibu hamil dan balita akan menimbulkan banyak keburukan. Balita yang kekurangan gizi akan mengakibatkan terjadinya malnutrisi dan dapat juga menyebabkan stunting. (Garcia Cruz, 2017) dalam penelitiannya menemukan ukuran keluarga signifikan berpengaruh pada kejadian stunting. 11. Status Ekonomi Keluarga (Mulenga, 2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa pendapatan keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi kejadian stunting di Zambia. Pendapatan keluarga yang rendah akan mempengaruhi pemenuhan pangan. Pemenuhan pangan yang kurang akan mempengaruhi pemenuhan gizi.

Dari data penelitian (Moges, 2015) menunjukkan status pendapatan yang rendah mempengaruhi tingkat kejadian stunting pada anak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ngaisyah, 2015) yang menemukan stunting lebih banyak terjadi pada keluarga yang berpenghasilan dibawah upah minimum regional (UMK).

3. Dampak Stunting

Masalah gizi terutama masalah balita stunting dapat menyebabkan proses tumbuh kembang menjadi terhambat, dan memiliki dampak negatif yang akan berlangsung untuk kehidupan selanjutnya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa balita pendek sangat berhubungan dengan prestasi pendidikan yang kurang dan pendapatan yang rendah sebagai orang dewasa (Astutik, 2018). Menurut WHO, dampak yang terjadi akibat stunting

dibagi menjadi dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang

Dampak jangka pendek, yaitu:

- a. Peningkatan kejadian kesakitan dan kematian
- b. Perkembangan kognitif, motorik dan verbal pada anak tidak optimal
- c. Peningkatan biaya kesehatan Dampak jangka panjang, yaitu: 1.) Postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa (lebih pendek bila dibandingkan pada umumnya) 2.) Meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya 3.) Menurunnya kesehatan reproduksi 4.) Kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah 5.) Produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal.

4. Ciri – Ciri Anak yang Mengalami Stunting

Berdasarkan Kemendesa PDTT RI (2017), adapun ciri-ciri stunting pada anak (Saadah, 2020): 1. Tanda pubertas terlambat 2. Performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar 3. Pertumbuhan gigi terlambat 4. Usia 8 – 10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan tatap mata 5. Pertumbuhan melambat 6. Wajah tampak lebih mudah dari usianya

Menurut dr. Endy Paryanto Prawirohartono, Sp.A (K) (2016) dan Rofi Nur Hanifah P., S.Gz dari RSUP Dr. Sardjito, gejala yang ditimbulkan akibat stunting antara lain anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih mudah/ kecil untuk usianya, berat badan rendah untuk anak seusianya dan pertumbuhan

tulang tertunda. Tinggi atau pendeknya tubuh anak sebenarnya bisa dengan mudah diketahui, jika tumbuh kembang anak dipantau sejak ia lahir (Imani, 2020).

5. Dasar Hukum dan Komitmen Nasional Percepatan Pencegahan Stunting

Pemerintah telah memiliki dasar hukum untuk melakukan perbaikan status gizi dalam rangka percepatan pencegahan stunting yang tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta keterlibatan dalam gerakan global.

- a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan meliputi diantaranya arah dan tujuan perbaikan gizi masyarakat. Tujuan tersebut adalah meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat, melalui: a) Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang; b) Perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; c) Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan d) Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kerangka Kebijakan Gernas 1.000 HPK)
- b. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa status gizi masyarakat merupakan salah satu pertimbangan dalam pembangunan pangan dan mewajibkan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAPG) setiap lima tahun.

- c. Peraturan Presiden (Perpres) No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG). Gernas PPG dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) yang kemudian berubah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sebagai Ketua Gugus Tugas. Perpres ini merupakan wujud keterlibatan Indonesia dalam gerakan global Scaling Up Nutrition (SUN) 2011.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680).
- e. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 172).
- f. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3).
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3)
- i. Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peran Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting
- j. Keputusan Bupati Bone Nomor 304 Tahun 2020 Tentang Penetapan Desa Sebagai Lokasi Prioritas Penanganan Stunting Kabupaten Bone Tahun 2021
- k. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 188 tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Bone

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian tentang *collaborative governance* dan stunting.

Perbandingan antara penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Penelitian terdahulu

No.	Penulis	Hasil Penelitian terdahulu	Hasil Penelitian Sekarang	Relevansi	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
1	(Rahayu A. Y., 2020) <i>Collaborative governance to achieve SDGs social development: Preventing stunting lesson from Pandeglang</i>	Penanganan program stunting di Pandeglang masih banyak menemui formalisme. Jadi, kita tidak bisa mengukur output dan outcome dari program tersebut. Untuk itu peneliti memberikan rekomendasi penguatan dukungan sumber daya dan capacity building bagi seluruh komponen yang terlibat dalam program ini agar program dapat menghasilkan outcome yang dirasakan di masyarakat.	Penanganan stunting di Kabupaten Bone telah menurunkan angka stunting meskipun angkanya masih tergolong cukup tinggi.	Sama-sama mengamati dan meneliti tentang collaborative stunting	Perbedaan pada penelitian yang dilakukan adalah teori yang digunakan. Pada penelitian terdahulu digunakan teori Emerson dan Nabatchi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori Debbie Roberts.

No.	Penulis	Hasil Penelitian terdahulu	Hasil Penelitian Sekarang	Relevansi	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
2.	(Saufi, 2021) Dinamika <i>Collaborative Governance</i> dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19	Dinamika <i>collaborative governance</i> dalam penanggulangan stunting di Provinsi Jawa Timur masih terdapat kesenjangan. Kesenjangan itu diperoleh dari temuan data bahwa masih dominannya peran pemerintah dan lambannya dalam mentransformasikan kebijakan yang ada di rencana aksi daerah. Kesenjangan itu dilihat dari indikator keberhasilan kolaborasi yakni kesepakatan institusi ditandai masih sebatas komitmen bersama tanpa dielaborasi secara	Penanganan stunting di Kabupaten Bone masih didominasi oleh pemerintah. Keterlibatan swasta masih minim	Sama-sama meneliti dan mengamati <i>collaborative governance</i> dalam penanggulangan stunting	Perbedaan pada penelitian yang dilakukan yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>). Sedangkan pada penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif deskriptif

		<p>mendalam keberpihakan di masing-masing stakeholder dan capaian kinerjanya. Lemahnya aturan hukum tentang kewajiban para pihak terutama sekali perusahaan swasta dalam refocusing tanggungjawabnya pada penanganan stunting.</p> <p>Kepemimpinan dalam kolaborasi masih bersifat sentralistik dalam pengambilan kebijakan dan lemah dalam mengakomodir sumberdaya dukungan dari luar seperti swasta, media, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

No.	Penulis	Hasil Penelitian terdahulu	Hasil Penelitian Sekarang	Relevansi	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
3.	(Manggala, 2021) Faktor-Faktor Keberhasilan Program Promosi Kesehatan “Gempur Stunting” Dalam Penanganan Stunting di Puskesmas Rancakalong Sumedang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurunkan angka prevalensi stunting tertinggi di Sumedang dikarenakan adanya faktor-faktor pendukung diantaranya: (1) Variasi kegiatan yang berbasis masyarakat; (2) Kolaborasi dan koordinasi yang baik antar sektor terkait dan (3) Sustainabilitas program promosi kesehatan gempur stunting	Masing-masing OPD yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting mempunyai peran serta program tersendiri dalam mempercepat penurunan stunting	Sama-sama meneliti dan mengamati stunting	Perbedaan pada penelitian yang dilakukan adalah pada fokus penelitian, serta lokasi penelitian. Pada penelitian Manggala, berfokus kepada faktor keberhasilan program gempur stunting, sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada efektivitas kolaborasi

No.	Penulis	Hasil Penelitian terdahulu	Hasil Penelitian Sekarang	Relevansi	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
4.	(Sukanti, 2021) <i>Collaborative Governance</i> Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Sleman	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan <i>collaborative governance</i> yang diukur dengan dinamika kolaborasi yakni keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama secara keseluruhan sudah cukup baik, namun beberapa indikator belum berjalan dengan baik, yaitu belum tersedia forum komunikasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dari lima indikator efektivitas kolaborasi sudah berjalan dengan baik, dan dua indikator belum berjalan dengan baik.	Sama-sama meneliti dan mengamati <i>collaborative governance</i> dalam upaya penanggulangan stunting	Perbedaan pada penelitian yang dilakukan adalah teori yang digunakan. Pada penelitian terdahulu digunakan teori Ansel dan Gash, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori Debbie Roberts.

No.	Penulis	Hasil Penelitian terdahulu	Hasil Penelitian Sekarang	Relevansi	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
5.	(Putri E. N., 2021) <i>Collaborative Governance</i> dalam Penanggulangan Stunting di Desa Kaliandru Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi sudah efektif dengan fenomena dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga indicator yang sudah berjalan dengan baik yaitu tujuan umum, mutualitas dan lingkungan kolaborasi	Sama-sama meneliti dan mengamati collaborative governance dalam upaya penanggulangan stunting	Perbedaan pada penelitian yang dilakukan adalah teori yang digunakan. Pada penelitian terdahulu digunakan teori Ansel dan Gash, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori Debbie Roberts
6.	(Basyar, 2022) <i>Collaborative governance</i> in CSR management program for slum area rehabilitation	Hasil menunjukkan bahwa keberhasilan <i>Collaborative Governance</i> yang terjadi antara Pemerintah, PT. ASTRA dan masyarakat dapat berjalan maksimal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara sesama stakeholders masih perlu ditingkatkan	Sama-sama meneliti dan mengamati kolaborasi	Perbedaan pada penelitian yang dilakukan adalah teori yang digunakan. Pada penelitian terdahulu digunakan teori Donahue & Zeckhauser, sedangkan pada

		karena mampu berkolaborasi dalam 4 bentuk, yaitu a) Kolaborasi untuk Produktivitas, b) Kolaborasi untuk Informasi; c) Kolaborasi untuk Legitimasi Tata kelola kolaboratif; dan d) Kolaborasi untuk Sumber Daya. Dari 4 jenis kolaborasi yang peneliti analisis, semua keterampilan kolaborasi yang terjadi sesuai dengan 8 keterampilan yang dikemukakan oleh (Donahue & Zeckhauser, 2011).			penelitian ini menggunakan teori Debbie Roberts
7.	(Ipan, 2021) <i>Collaborative governance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi	Sama-sama meneliti dan mengamati collaborative	Perbedaan pada penelitian yang dilakukan adalah

	dalam penanganan stunting	dalam penanganan stunting berjalan dengan cukup baik. Hal itu ditandai dengan adanya penurunan jumlah stunting di wilayah UPTD Puskesmas Ciampel	telah menurunkan angka stunting	governance dalam upaya penanggulangan stunting	fokus penelitian. Pada penelitian Ipan, berfokus pada proses kolaborasi, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada efektivitas kolaborasi
8.	(Rosalia, 2022) <i>Actor's Network of Stunting Prevention Program in Bandar Lampung City, Lampung, Indonesia</i>	Pada penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan: apa karakteristik jejaring sosial dalam program pencegahan stunting? Siapa aktor dominan dalam jejaring sosial dalam program pencegahan stunting? Ada berapa faksi di jejaring sosial dalam program pencegahan stunting?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dari lima indikator telah berjalan dengan efektif	Sama-sama meneliti dan mengamati stunting	Perbedaan pada penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian. Penelitian Rosalia menggunakan metode social network analysis (SNA) yang merupakan turunan dari pendekatan kuantitatif-deskriptif.

No.	Penulis	Hasil Penelitian terdahulu	Hasil Penelitian Sekarang	Relevansi	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
9.	(Yopiannor, 2019) <i>Collaboration in Implementation of Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program in PalangkaRaya City</i>	Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi kinerja KOTAKU di Palangka Raya berhasil. Hal ini terlihat dari total kawasan kumuh yang berkurang secara signifikan. Dinamika kolaborasi menunjukkan bahwa siklus interaktif antara pelibatan prinsip, motivasi bersama dan kapasitas aksi bersama berjalan dengan baik. Kinerja CGR didukung oleh dua faktor, yaitu: dinamika politik atau relasi kekuasaan dan inisiatif kepemimpinan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar stakeholders telah terjalin tetapi komunikasi masih perlu ditingkatkan untuk lebih memperat kebersamaan antar stakeholders	Sama-sama meneliti dan mengamati kolaborasi	Perbedaan pada penelitian yang dilakukan adalah teori yang digunakan. Pada penelitian terdahulu digunakan teori Emerson dan Nabatchi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori Debbie Roberts

No.	Penulis	Hasil Penelitian terdahulu	Hasil Penelitian Sekarang	Relevansi	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
10.	(Afandi, 2022) <i>A Penta-Helix Approach to Collaborative Governance of Stunting Intervention In West Java Indonesia</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan Penta-helix untuk menganalisis kolaborasi lima jenis pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola kolaboratif stunting. Pemangku kepentingan meliputi pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Kerangka tersebut telah dirancang oleh pemerintah untuk mengakomodasi tata kelola kolaboratif,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dari lima indikator dalam efektivitas kolaborasi telah berjalan dengan efektif yaitu tujuan umum, mutualitas dan lingkungan kolaborasi. Dua diantaranya yang kurang efektif yaitu kepercayaan dan karakteristik pribadi tertentu.	Sama-sama meneliti dan mengamati kolaborasi	Perbedaan pada penelitian yang dilakukan adalah pada fokus penelitian, serta lokasi penelitian. Pada penelitian Afandi, berfokus kepada pendekatan penta-helix kelima pemangku kepentingan yang berkolaborasi. Sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada efektivitas kolaborasi

		<p>tetapi implementasinya tidak mencapai hasil yang diinginkan. Kolaborasi tersebut gagal memenuhi kriteria keterlibatan penuh dalam proses pengambilan keputusan, karena aktor non-negara berpartisipasi tanpa tanggung jawab yang lebih formal. Pemangku kepentingan perlu menciptakan nilai bersama dan mendeklarasikan komitmen yang lebih kuat terhadap tata kelola kolaboratif yang berkualitas.</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

F. Kerangka Pikir

Stunting merupakan permasalahan yang sedang dihadapi hingga saat ini. Pemerintah telah gencar dalam mengupayakan agar dapat menekan angka stunting dan mencegah terjadinya stunting. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang termasuk pada tujuan kedua yaitu untuk mengakhiri kelaparan dan segala bentuk malnutrisi serta mencapai ketahanan pangan pada tahun 2030.

Kabupaten Bone merupakan salah satu wilayah yang memiliki angka stunting yang cukup tinggi. Hal ini membuat Kabupaten Bone menjadi wilayah prioritas dalam percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan sejak tahun 2019. Stunting merupakan permasalahan yang sangat kompleks, sehingga dalam penanganannya tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi saja, tetapi harus melibatkan berbagai lembaga untuk saling bekerja sama dalam menanggulangi stunting. Maka dalam penelitian ini digunakan teori (Debbie Roberts, 2016) yaitu teori keefektifan kolaborasi. Hal ini karena teori keefektifan kolaborasi Debbie Roberts memiliki kecenderungan yang sama dengan kolaborasi yang dilakukan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone. Dimana kolaborasi yang efektif harus memiliki saling kepercayaan (*trust*) yang menjadi faktor paling mendasari keberhasilan kolaborasi.

Kolaborasi yang efektif harus memperhatikan hal-hal seperti tujuan umum (*common purpose*), Mutualitas (*mutuality*), lingkungan yang

memungkinkan (*enabling environment*), kepercayaan (*trust*), karakteristik pribadi tertentu (*specific personal characteristic*). Untuk lebih jelasnya kerangka pikir digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4 Kerangka Pikir

